

2022



**PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAPORAN KINERJA

LAPORAN

- **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN**
- **ANALISA CAPAIAN KINERJA**
- **LAPORAN KEUANGAN**

KATA PENGANTAR



Fokus agenda kerja Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 yaitu “Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Belanja pemerintah diefektifkan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh yaitu pengembangan kawasan strategis, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung hal tersebut, DKP Aceh telah melaksanakan berbagai program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022. Pencapaian Program diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas. Guna memastikan target IKU tercapai, DKP Aceh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai bentuk peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Seluruh kebijakan yang dilaksanakan tahun 2022 merupakan penjabaran dari 2 misi gubernur Aceh, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 6



Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2022 termasuk capaian target beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2022, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, kerja keras jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh, Februari 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



ALIMAN, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh	2
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Sumber Daya Manusia DKP Aceh	6
1.6. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh	8
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Penetapan Kinerja	17
2.4. Program Instansi	19
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja	24
3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh	51
BAB 4. PENUTUP	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

1.1. Rincian ASN dan Tenaga Kontrak DKP Aceh Berdasarkan Jabatan -----	06
1.2. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan -----	06
1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan -----	07
2.1. Visi dan Misi Pemerintahan Aceh, Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan -----	15
2.2. Perjanjian Kinerja DKP Aceh Tahun 2022 -----	18
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama DKP Aceh Tahun 2022 -----	22
3.2. Perkembangan Capaian NTN Tahun 2018-2022 -----	26
3.3. Perkembangan Capaian NTPi Tahun 2018-2022 -----	28
3.4. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022 -----	31
3.5. Capaian Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan Tahun 2018-2022 -----	34
3.6. Capaian Produksi Perikanan 2018-2022 -----	35
3.7. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022 (Ton) -----	36
3.8. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2022 Menurut Komoditas Utama (Ton) -----	38
3.9. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022 (Ton) -----	39
3.10. Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017-2022 Menurut Komoditas Utama (Ton) -----	39
3.11. Capaian Produksi Garam Tahun 2018-2022 (Ton) -----	41
3.12. Produksi Garam (Ton) Per Kabupaten Sentra Garam Aceh -----	42
3.13. Capaian Nilai Ekspor Perikanan Aceh Tahun 2018-2022 -----	44
3.14. Capaian Luas Kawasan Konservasi (Ha) -----	46
3.15. Luas Kawasan Konservasi (Ha) -----	47
3.16. Proporsi Tangkapan Ikan Selama 2017-2022 Terhadap MSY (%) -----	49
3.17. Capaian Rasio Luas Kawasan Terhadap Perairan Teritorial (%) 2018-2022 ----	50

3.18. Capaian Nilai Kinerja Anggaran DKP Aceh Tahun 2018-2022 -----	51
3.19 Pagu Dan Realisasi Anggaran Dkp Berdasarkan Program -----	52



DAFTAR GAMBAR

3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2017-2022 -----	27
3.2. Peningkatan Sarpras Pelabuhan dan Bantuan Alat Tangkap Tahun 2022 -----	28
3.3. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Selama Tahun 2018-2022 -----	29
3.4. Bantuan Bioflok, Benih Dan Pakan Pada Program Budidaya Tahun 2022 -----	30
3.5. Kegiatan Gemarikan dalam Meningkatkan Konsumsi Ikan di Aceh -----	33
3.6. Trend Nilai PDRB Perikanan ADHB Tahun 2016-2021 (Rp.milyar) -----	34
3.7. Perkembangan Produksi Perikanan Selama Tahun 2016-2022 -----	36
3.8. Pelaksanaan Integrasi Lahan Garam di Tahun 2022 -----	43
3.9. Grafik Pagu, Realisasi dan Sarapan Anggaran APBA DKP Aceh Tahun 2017-2022 -----	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	57
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	58

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Qanun Aceh No 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2022, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa indikator Kinerja utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2023 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2022 sebesar 95,62% atau mengalami peningkatan sebesar 3,14% dari tahun 2021.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 8 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2022, terdapat 5 IKU yang pencapaiannya melebihi target dan 3 IKU yang belum dapat mencapai target.
2. IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: 1). Nilai tukar nelayan, 2). Nilai tukar pembudidaya ikan, 3). Konsumsi ikan, 4). Produksi perikanan 5). Nilai ekspor perikanan.

3. 3 IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: 1). Produksi garam, 2). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh dan 3). Luas kawasan konservasi perairan.

Kinerja keuangan DKP Aceh tahun 2022 dilaksanakan melalui pelaksanaan 6 program dalam APBA. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPA Awal terbit sebesar Rp. 222.626.392.960,- dan terdapat penambahan sebesar Rp. 2.213.000.000,- menjadi 224.839.392.960,- pada DPA perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2022 dapat direalisasi sebesar 95,97%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan DKP Aceh tahun 2022 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Aceh.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut merupakan sarana akuntabilitas bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis DKP Aceh tahun 2017-2022, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 terdapat 6 sasaran strategis dengan 8 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, DKP Aceh melaksanakan 5 (lima) program utama pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 9 Unit Kerja Eselon III di lingkup DKP Aceh.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja DKP Aceh tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DKP Aceh. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja DKP Aceh Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran DKP Aceh selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugas DKP Aceh adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DKP Aceh menyelenggarakan fungsinya :

- A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- B. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- C. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- D. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- E. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- F. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- G. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- H. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- I. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- J. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- K. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan

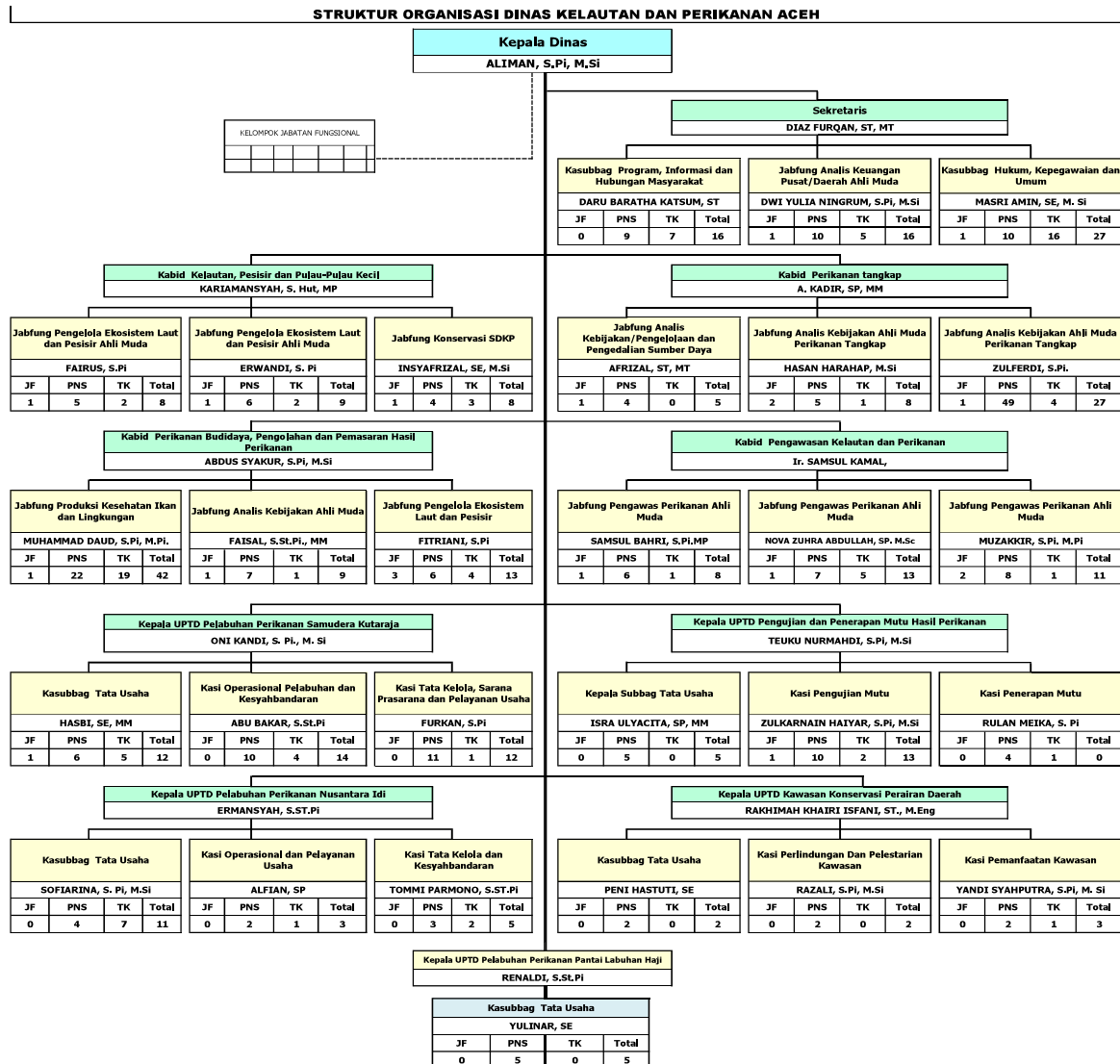
- ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- L. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
 - M. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - N. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - O. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - P. Pembinaan UPTD;
 - Q. dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Struktur Organisasi

Kelembagaan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP Aceh) dibentuk berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Susunan organisasi DKP Aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.5 Sumber Daya Manusia DKP Aceh

Susunan kepegawaian pada DKP Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 342 orang yang terdiri dari 26 orang pejabat struktural dengan persentase 7.6%, 21 orang pejabat fungsional 6.1%, 200 orang staf dengan persentase 58.5%, dan 95 orang tenaga kontrak dengan persentase 27.8%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai DKP Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1. RINCIAN PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	26	7,6%
2.	Fungsional	21	6,1%
3.	Staf	200	58,5%
4.	Tenaga Kontrak	95	27,8%
	Jumlah	342	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Menurut golongan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh sebanyak 247 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 31 orang, golongan III sebanyak 174 orang, golongan II sebanyak 38 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

TABEL 1. 2 RINCIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	31	12,6%
III	174	70,4%
II	38	15,4%
I	4	1,6%
Jumlah	247	100 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS pada, golongan IV sebesar 12,6%, golongan III sebesar 70,4%, golongan II sebesar 15,4%, dan golongan I sebesar 1,6%. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa DKP Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DKP Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya manusia berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Persentase strata pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh terbanyak pada jenjang S1 sebesar 57.1% dan paling sedikit pada jenjang S3 dan SD sebesar 0.4%. Angka persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu semakin ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Rincian jumlah dan persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

TABEL 1.3. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	1	0.4%
S2	50	20,2%
S1	141	57,1%
D4	5	2%
D3	4	1,6%
SLTA	42	17%
SLTP	3	1,2%
SD	1	0.4%
Jumlah	247	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2021

1.6. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh

A. Potensi

Pembangunan Perikanan dan Kelautan ke depan selain diharapkan dapat mengisi permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidayaan ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Aceh diperkirakan sebesar 272,7 ribu ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah aceh dan perairan (ZEE). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut baru dimanfaatkan sebesar 208 ribu ton pada tahun 2017 atau baru 76%. Hasil perikanan tangkap ekonomis penting di Provinsi Aceh terdiri dari 15 jenis ikan dari kelompok ikan pelagis, kelompok ikan demersal, dan kelompok non-ikan (udang, crustacea dan molusca), dimana pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 283.676,35 ton. Selain itu Aceh memiliki komoditi perikanan tangkap ekonomis dan bernilai ekspor antara lain Tuna, Cucut, Tongkol, Bawal Putih, Bawal Hitam Tenggiri, Kerapu dan Lobster.

Aceh juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar mencapai 76.103,18 ha luas lahan tambak dan 4.056,59 ha luas lahan kolam budidaya. Produksi total

perikanan budidaya pada tahun 2021 mencapai 134.270,70 ton terdiri dari budidaya payau sebesar 118.457,26 ton dan produksi budidaya tawar sebesar 15.813,43 ton.

B. Permasalahan

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Aceh yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Adapun peta permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budi daya (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
3. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi;
4. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan;
5. Ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;
6. Belum optimalnya pengawasan UU fishing;
7. Peningkatan kawasan konversi laut nasional;
8. Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi; dan
10. Peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Beberapa wilayah perairan laut Aceh sering terjadi praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh (WPP 571 dan WPP 572), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin

penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh belum memadai.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya seperti (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas; (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas; (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya; (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi)implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien. Selain itu masih terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai daerah yang memiliki panjang pantai 2.666,27 Km, sudah seharusnya kebutuhan garam daerah dapat dipenuhi dari produksi. Saat ini produksi garam daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana serta masih tingginya biaya logistik. Industri pengolahan ikan, masih membutuhkan bahan baku dengan jenis ikan yang spesifik dan standar kualitas tertentu, serta suplai yang kontinyu. Faktor utama yang menyebabkan utilisasi industri pengolahan ikan rendah adalah suplai bahan baku ikan yang kurang. Saat ini distribusi stok ikan tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan di mana sebagian besar bahan baku ikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, perlu didorong

regulasi terkait penangkapan ikan untuk bahan baku industri dan regulasi untuk mendorong sistem logistik ikan yang efisien.

1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DKP Aceh Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- B. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis DKP Aceh 2017-2022 dan perjanjian kinerja tahun 2021;
- C. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan DKP Aceh tahun 2021; dan
- D. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja DKP Aceh dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017–2022 yang menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih dalam bentuk agenda (tujuan) dan prioritas (sasaran) pembangunan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan.

Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji RPJMA, Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 mencakup visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh, visi pembangunan diarahkan untuk ***"Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani"***. Visi tersebut dilakukan dengan pelaksanaan 2 misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; dan Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh yang telah ditentukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah merumuskan beberapa tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merefleksikan visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat terealisasi dengan baik. Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu :

1. Menurunnya angka kemiskinan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan; dan
3. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 – 2022. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2022) yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan;
4. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan; dan
5. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

C. Strategi

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan perlu menerapkan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mencapai sasaran, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam

melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi tersebut yaitu :

1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan;
2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan;
4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik;
5. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan;
7. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
8. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
9. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
10. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan;
11. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir;
12. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
13. Memberantas pelanggaran IUU Fishing; dan
14. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

D. Kebijakan

Adapun arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan;
5. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan;
6. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan;
7. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan;

8. Membangun kawasan unggulan perikanan;
9. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran;
10. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;
11. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
12. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
13. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
14. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

TABEL 2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAHAN ACEH, TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI			
MISI 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan 2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan	1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan 2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan

		pengolah hasil perikanan 4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan 3. Penguatan kapasitas budidaya perikanan 4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok 5. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran 6. Peningkatan pengelolaan sumberdaya ikan	1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan 2. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan 3. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan 4. Membangun kawasan unggulan perikanan 5. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran 6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
MISI 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tatakelola	1. Bertambahnya luasan kawasan	1. Peningkatan kualitas kawasan	1. Meningkatkan pengendalian dan

lingkungan Hidup lestari	konservasi laut dan pesisir	konservasi laut dan pesisir 2. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan 3. Memberantas pelanggaran IUU Fishing 4. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
--------------------------	-----------------------------	--	---

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, maka Dinas kelautan dan Perikanan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi);
3. Konsumsi ikan;
4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh;
5. Produksi perikanan;
6. Produksi Garam;
7. Nilai Ekspor Perikanan; dan
8. Luas kawasan konservasi perairan.

2.3. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja DKP Aceh tahun 2022, secara rinci sebagai berikut:

TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA DKP ACEH TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	106.00 103.00
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	58,64
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,32
4.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	5. Produksi Perikanan (ton) a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 6. Produksi Garam (ton)	370.250,00 231.568,00 138.682,00 43.166,52
5.	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	7. Nilai Ekspor Perikanan (US\$)	1.794.561,00
6.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	8. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	281.100,00

2.4. Program Instansi

Untuk mendukung pencapaian kinerja DKP Aceh tahun 2021, maka dilaksanakan 6 (enam) program pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan tujuan agar terlaksananya penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan berupa Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;

- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
- d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan baik pasar domestik maupun internasional dan menjamin akan keamanan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun sasaran program yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar; dan
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

E. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan di pulau pulau kecil melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

F. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga kelestarian dan pengawasan lingkungan dari perusakan yang tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan kawasan konservasi secara lestari dengan sasaran peningkatan kawasan konservasi perairan. Selain itu, sasarannya adalah Perairan Aceh bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil; dan
2. Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan renangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam upaya mensukseskan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki beberapa sasaran strategi dengan indikator kinerja utama dan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2022 dijabarkan secara deskriptif dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis. Profil capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa periode tahun yang lalu untuk melihat pola capaian secara tahunan.

Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan wujud kerja yang dapat dinilai dari hasil pengukuran kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pengukuran kinerja tersebut dianalisis berdasarkan penilaian seluruh perjanjian kinerja yang mendukung sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2022. Pengukuran realisasi kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala.

Dalam mewujudkan kinerjanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupaya untuk mencapai realisasi kinerja yang optimal dan memenuhi seluruh target di masing-masing sasaran strategis. Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DKP ACEH TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,00	111,83	105,05

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPI)	103,00	105,94	102,85
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,64	60,58*	103,31
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,32	5,15**	96,80
4	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi perikanan (ton)	351.429,39	420.500,70 *	113,57
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	231.568,00	285.094,73 *	123,11
		Produksi perikanan Budidaya (ton)	138.682,00	135.405,97 *	97,64
		Produksi garam (ton)	43.166,52	18.384,98 *	42,59
5	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.794.561,00	2.359.588,00 **	131,49
6	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	281.100,00	171.115,84 **	60,87
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	80,67	87,68	108,69
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	4,96	3,03	61,09

Keterangan : * angka semetara ** angka sangat sementara

Pada tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki 6 Sasaran Strategis (SS) dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada tahun 2022 didominasi oleh capaian yang diharapkan.

Dari 6 total Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 4 sasaran strategis yang melebihi target atau lebih dari 100 % yaitu (1) Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, (2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan, (3) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, Meningkatkan neraca perdagangan perikanan dan (4) Meningkatkan neraca perdagangan perikanan. Sementara itu, terdapat 2 sasaran strategis yang nilai capaiannya dibawah 100 % yaitu (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh, dan (2) Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir.

Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada masing-masing sasaran strategis, terdapat 6 dari 10 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target dengan nilai capaian lebih dari 100%, yaitu : Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Konsumsi Ikan, Produksi Perikanan, dan Nilai Ekspor Perikanan. Terdapat 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki nilai capaian kurang dari 100 % yaitu : Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh, Produksi Garam, Luas kawasan konservasi perairan dan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial.

Berdasarkan paparan deskriptif Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di Tahun 2022 secara umum mampu merealisasikan sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya dengan optimal dan sesuai target yang diharapkan.

3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2022, maka capaian Nilai Tukar di atas angka 100 dan mencapai target tahun 2022, begitu juga Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) berada di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2022.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Persentase tingkat capaian NTN tahun 2022 adalah 105,05 % , dimana Realisasi NTN adalah 111,83 % dengan target 106,00 %. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2022 mengalami trend positif dimana NTN pada tahun 2020 adalah 97,48, pada tahun 2021 adalah 105,07 dan di tahun 2022 yaitu sebesar 111,83 %.

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2022

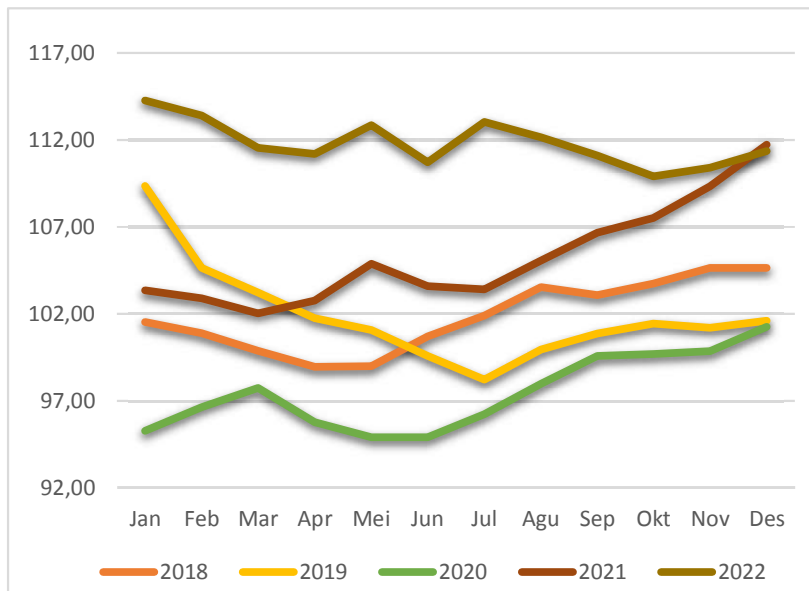
Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,07	106,00	111,83	105,50	106,00	105,50

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh)

Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian target Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan.

Persentase Pertumbuhan NTN pasca covid-19 mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir (2020-2022). Pola persentase NTN bergerak naik di tahun 2021 disebabkan masih terjadinya wabah covid-19 tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan nilai NTN pada tahun tersebut.

GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA \TAHUN 2018-2022



Selama tahun 2022, NTN mengalami tren relatif stabil di rata-rata angka 112,00. NTN tertinggi berada di awal Januari 2022 dan terdapat sedikit koreksi/ penyesuaian angka di bulan April, Juni dan pertengahan September Oktober. Tren

naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan dan kondisi subsidi BBM masih dalam kondisi normal dan terkontrol oleh nelayan. Sementara sedikit koreksi/ penyesuaian angka NTN di bulan April, Juni dan pertengahan September Oktober diduga akibat faktor cuaca dan sedikit penyesuaian harga BBM bersubsidi. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama lima tahun terakhir (2018 s.d 2022) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, terdapat penurunan sebesar 3% pada NTN di tahun 2018 dibandingkan tahun 2019, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami juga mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,3%, tahun 2020 ke tahun 2021 NTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,9%. Sementara di Tahun 2022 NTN naik 6,23 % dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2022 sebesar 106, posisi capaian tahun 2022 sudah mencapai 111,83.

Tercapainya target NTN tahun 2022 dikarekan adanya stimulus bantuan ekonomi dalam penanganan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya daya beli dari nelayan. Selain itu, juga dipacu oleh penambahan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung stabil untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat

inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan penanganan pasca panen seperti tersedianya cold storage.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. meningkatkan NTN sebesar 111,83 pada tahun 2022 diantaranya melalui insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap seperti pengadaan cool box, paket pengadaan alat tangkap nelayan, pengadaan rumpon, pengadaan boat fiber, pengadaan mesin, GPS/Fish Finder, Life jacket dan TDKP. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi pelabuhan perikanan yang tersebar di beberapa kabupaten kota juga dilakukan untuk mendukung pencapaian produksi perikanan yang optimal.

GAMBAR 3.2. PENINGKATAN SARPRAS PELABUHAN DAN BANTUAN ALAT TANGKAP TAHUN 2022



IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

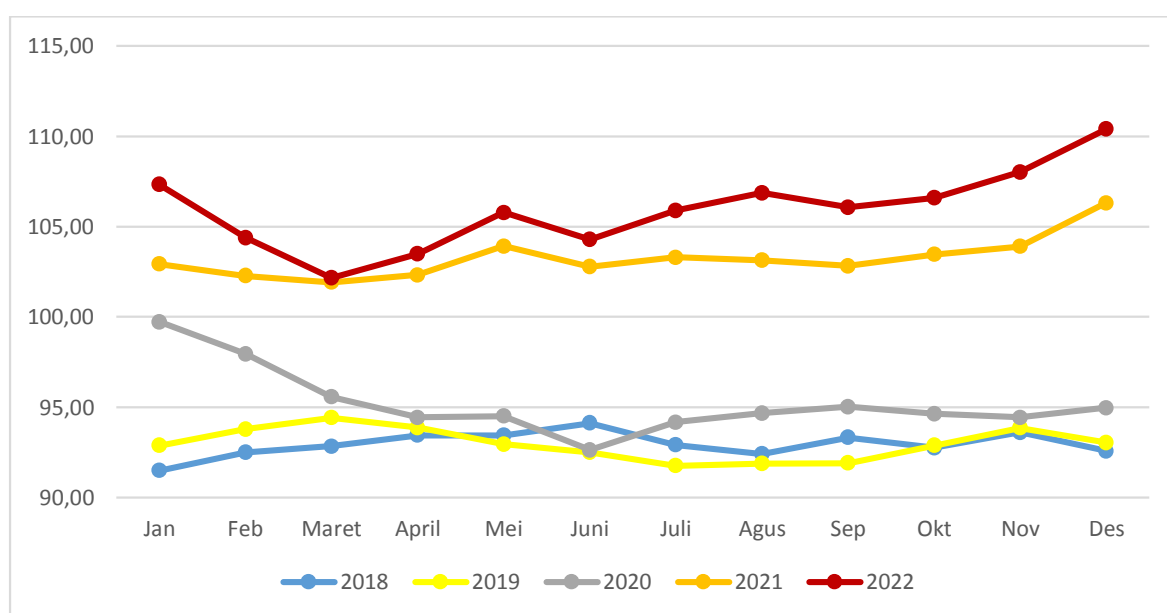
TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2022

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	103,26	103,00	105,94	102,85	103,00	102,85

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2022 mencapai sebesar 105,94 atau sebesar 102,85 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2022 sudah mencapai target 102,85 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaiannya 103,26, maka terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,4 persen. Tercapainya target NTPi tahun 2022 disebabkan karena karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan juga disertai peningkatan volume produksi. Selain itu, juga dipicu Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan telah diintervensi pemerintah dalam bentuk bantuan pada klaster perikanan budidaya unggulan.

GAMBAR 3.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2018-2022



Secara rata-rata NTPi tumbuh sebesar 4,56 persen selama tahun 2022, meningkat dari 107,32 pada Januari 2022 menjadi 110,40 pada Desember 2022. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 105,94. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 berada di atas 100. Selama tahun 2022, NTPi tertinggi berada pada bulan Desember yaitu sebesar 110,40 dan terendah berada pada bulan Maret yaitu sebesar 102,16. Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPi adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus

menjaga harga komoditas ditingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang di keluarkan oleh pembudidaya.

Penyebab terus membaiknya nilai NTPi ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha perikanan budidaya untuk menerapkan teknologi secara optimal dalam proses produksi dan usaha budidaya ikan. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk seperti bantuan pakan yang dapat meminimalisir pengeluaran sistem budidaya, penerapan sistem bioflok untuk pengoptimalan lahan, pakan dan kuantitas hasil panen, bantuan benih dan induk unggul untuk memastikan ikan hasil budidaya berkembang baik dan tahan penyakit, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya.

GAMBAR 3.4. BANTUAN BIOFLOK, BENIH, PAKAN DAN SARPRAS PADA PROGRAM BUDIDAYA TAHUN 2022



Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) bantuan benih unggul (b) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan mesin pellet, dan pembinaan kepembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (c) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan

IKU 3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 3.4. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	60,07	58,64	60,58	103,31	58,64	103,31

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2022 adalah 60,58 kg/kapita/tahun, atau sedikit naik 0,85 % dibandingkan dengan capaian tahun 2021, yang besarnya 60,07

kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2022 telah memenuhi target sebesar 58,64 kg/kapita/tahun atau mencapai 103,31% dari target. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan.

Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2022 telah melampaui target yaitu 103,31% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logistik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil;
- Bazar rumah ikan higienis.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;
- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

GAMBAR 3.5. KEGIATAN GEMARIKAN DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI IKAN DI ACEH



C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh

IKU 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga berlaku) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, distribusi PDRB sub sektor perikanan atas harga berlaku tahun 2022 adalah sebesar 5,15% atau memenuhi 96,80 % dari target tahun 2022 yaitu 5,32%. Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2021 yang besarnya 5,59 % dan kenaikan rata-rata per tahun 2018-2022 sebesar 4,91 %. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2022 hanya mencapai 96,80 % dari target yang ditetapkan yakni sebesar 5,59 %. Membaiknya capaian PDRB sub sektor perikanan tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19 sehingga mampu meningkatkan aktifitas ekonomi sub sektor perikanan. Disisi lain, diikuti dengan peningkatan produksi tangkapan yang melimpah dan meningkatnya permintaan komoditas perikanan.

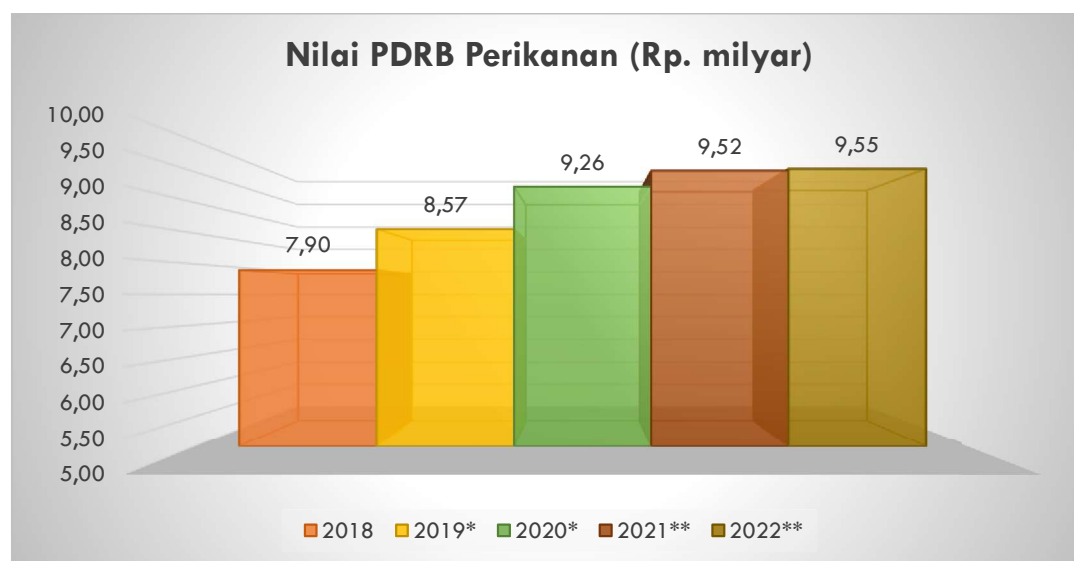
TABEL 3.5. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,59	5,32	5,15	96,80	5,32	96,80

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara ** data sangat sementara

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

GAMBAR 3.6. TREND NILAI PDRB PERIKANAN ADHB TAHUN 2018-2022 (Rp. milyar)



Sumber : BPS Aceh 2022 (diolah DKP); Ket: *= Angka sementara, **= Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan atas dasar harga berlaku, maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.7,90 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 9,55 milyar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan secara periodic tahunan terdapat penambahan investasi dan peningkatan penyaluran bantuan permodalan di masyarakat. Selain itu, Besarnya kontribusi sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

D. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

IKU 5. Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

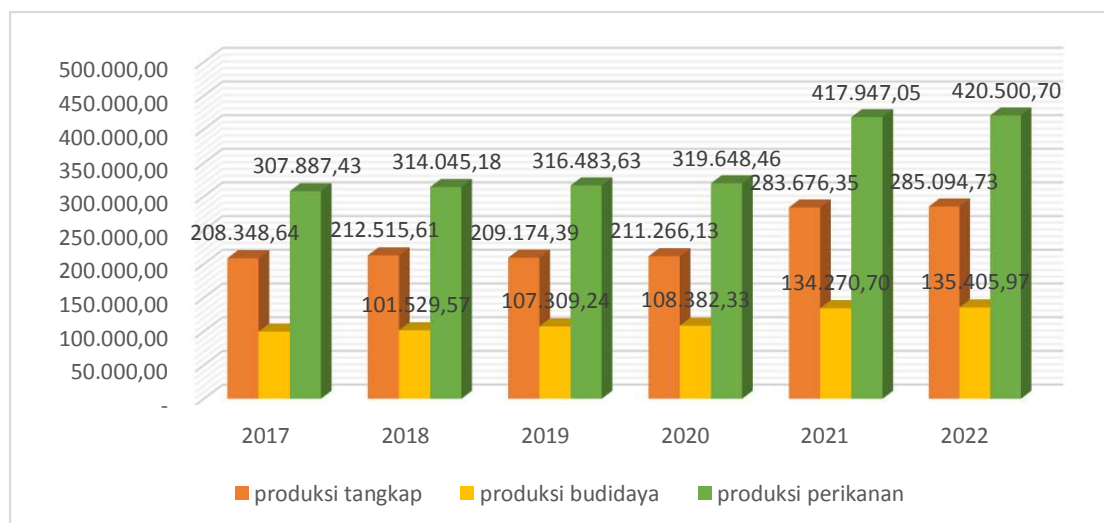
TABEL 3.6. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2022

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Produksi Perikanan (ton)	417.947,05	370.250,00	420.500,70	113,57	370.250,00	113,57

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Produksi perikanan tahun 2022 ditargetkan 370.250,00 ton, dan realisasinya sebesar 420.500,70 ton atau mencapai 113,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 417.947,05 ton, realisasi tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 113,57 %, untuk pertumbuhan produksi perikanan selama 5 (lima) tahun 2018-2022 sebesar 9,46%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2017-2022 yaitu sebesar 370.250 ton maka realisasi tahun 2022 telah tercapai sebesar 113,57%.

GAMBAR 3.7. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2017-2022



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2022.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2022 adalah sebanyak 231,568 ton atau mencapai 123,11% dari target tahun 2022 yaitu sebesar 283,676.35 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 96,98% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 275.117 ton dan sisanya sebesar 3,02% atau 8.559,73 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 3.7. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2019-2022 (TON)

REALISASI				TAHUN 2022*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2022	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2021
208.515,61	209.174,39	211.266,13	283.676,35	231.568,00	285.094,73	123,11	36,06	231.568,00	123,11

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2018 s.d tahun 2022 dengan periode yang sama sebesar 9,88%, yaitu sebesar 208.515,61

ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 283.676,35 ton pada tahun 2022. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 35,54 % dan Perairan Umum Daratan sebesar 40,15%. Sedangkan Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka capaian telah melampaui target sebesar 123,11%.

Terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan, DKP Aceh di tahun 2022 melakukan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan yang merupakan kegiatan prioritas DKP Aceh, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik melalui data statistik perikanan, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan di tahun 2022, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

**TABEL 3.8. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2022
MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun						Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	
I	Perikanan tangkap	208.348,64	208.515,61	209.174,39	211.266,13	283.676,36	285.094,74	35,67
A	Perikanan Tangkap laut	202.316,13	202.125,48	202.899,15	204.921,93	275.116,63	276.526,45	35,54
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	110.676,23	107.472,69	110.869,35	111.978,05	150.343,11	151.527,40	35,53
2	Kakap	20.588,42	20.855,87	20.625,58	21.391,61	28.679,73	28.809,16	37,98
3	Kembung	8.733,68	9.023,53	8.821,34	9.517,14	12.759,63	12.772,39	43,04
4	Tenggiri	9.589,74	9.674,84	9.655,25	9.751,80	13.074,24	13.087,32	35,76
5	Selar	18.712,50	19.838,41	18.227,88	19.655,76	26.352,48	26.378,83	39,80
6	Rajungan dan Kepiting	8.988,46	8.815,76	9.444,13	9.538,57	13.023,01	13.036,04	42,74
7	Lobster	4.481,53	4.790,61	4.475,94	4.520,70	6.172,11	6.178,28	37,86
8	Ikan Lainnya	20.545,57	21.653,77	20.779,68	18.568,30	24.712,32	24.737,03	23,80
B	Perikanan Tangkap PUD	6.032,51	6.390,13	6.275,24	6.344,20	8.559,73	8.568,29	40,15
1	Ikan	4.302,78	4.653,86	4.531,37	4.172,20	5.696,30	5.702,00	34,13
2	Udang	1.720,41	1.726,75	1.734,14	2.161,36	1.892,37	1.894,27	12,99
3	Lainnya	9,32	9,52	9,73	10,64	971,05	972,02	9.040

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Proporsi produksi perikanan tangkap tahun 2022, terdiri dari 97,08 % produksi perikanan tangkap laut dan 2,92 % produksi perikanan tangkap PUD. Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 28.809,16 ton, kakap mencapai 28.809,16 ton, kembung mencapai 12.772,39 ton, tenggiri mencapai 13.087,32 ton, selar mencapai 26.378,83 ton, rajungan dan kepiting mencapai 13.036,04 ton, lobster mencapai 6.178,28 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 24.737,03 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 5.702,00 ton, udang 1.894,27 ton, dan jenis lainnya mencapai 972,02 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2017-2022 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 135.405,97 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 138.682,00 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 97,64%. Produksi perikanan budidaya tahun 2022 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 134.270,70 ton.

TABEL 3.9. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019-2022 (TON)

REALISASI				TAHUN 2022*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2022	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2022
101.529,57	107.309,24	108.382,33	134.270,70	138.682,00	135.405,97	97,64	31,03	138.682,00	97,64

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Jika dilihat selama periode 2018-2022, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 31,03 % per tahun dari 101.529,57 ton di tahun 2018 menjadi 135.405,97 ton di tahun 2022*). Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 135.405,97 ton atau mencapai 97,64% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

TABEL 3.10. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2022 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun						Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	
I	Perikanan Budidaya	99.538,79	101.529,57	107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	32,58
1	Bandeng	14.320,20	14.446,90	16.101,71	16.262,73	22.351,54	22.530,35	50,78
2	Belanak	1.597,69	1.662,11	2.112,47	2.133,60	-	-	31,46
3	Mas	8.585,54	8.572,42	9.096,21	9.187,17	11.162,41	11.251,71	28,46
4	Lele	18.640,89	18.655,77	19.598,21	19.794,19	24.049,94	24.242,34	27,63
5	Patin	401,21	455,98	480,82	485,63	590,04	594,76	41,60
6	Nilu	12.700,65	13.155,70	13.590,24	13.726,14	16.677,26	16.810,68	29,39
7	Kerapu	2.023,23	2.166,25	2.415,51	2.439,67	2.964,19	2.987,91	41,08
8	Udang	39.802,72	40.871,63	42.239,06	42.661,45	54.446,48	54.943,17	34,66
9	Ikan Lainnya	1.466,66	1.542,81	1.675,00	1.691,75	2.028,82	2.045,05	34,69

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2022 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 54.943,17 ton, kemudian diikuti oleh ikan lele mencapai 24.242,34 ton, bandeng mencapai 22.530,35 ton, nila mencapai 16.810,68 ton, ikan mas mencapai 11.251,71 ton, kerapu mencapai 2.987,91 ton, patin mencapai 594,76 ton dan ikan lainnya mencapai 2.045,05 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2017-2022 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 32,58%.

Tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2022 antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembudidayaan udang jenis vaname dengan sistem intensif sehingga mampu meningkatkan produksi udang Aceh. Selain itu juga dipacu oleh produksi ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem bioflok yang mampu meningkatkan produksi. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani wabah covid 19 dalam bentuk stimulus ekonomi mampu menggairahkan petani kolam atau tambak untuk mengelola kembali usaha budidayanya, yang ditopang dengan meningkatnya permintaan pasar dari jenis komoditi unggulan budidaya.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2022 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng dan ikan lele. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan lele adalah bantuan sarana dan prasarana (benih unggul, pakan dan penerapan teknologi sistem bioflok) dan pendampingan teknis budidaya;
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;

- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Pengembangan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan melalui kegiatan terobosan utama pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Pantai;

IKU 6. Produksi Garam

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi garam Aceh merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang terdapat di 8 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2022 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 18.384,98 ton, lebih besar dari target tahun 2020 sebesar 7.662,7 ton.

TABEL 3.11. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2022 (TON)

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Produksi Garam (ton)	17.509,51	43.166,52	18.384,98	42,59	43.166,52	42,59

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, produksi garam mencapai 18.384,98 ton atau mencapai 42,59 % dari target yang ditetapkan. Realisasi produksi garam di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,99% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2021 yaitu sebesar 17.509,51 ton. Penyebab tidak tercapainya produksi

garam terhadap target tahun 2022 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan.

Target 25,542,32 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain, teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2022 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

TABEL 3.12. PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)			
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*
1	Aceh Selatan	19,45	20,90	23,36	24,53
2	Aceh Barat Daya	47,32	45,42	55,91	58,70
3	Aceh Besar	1.399,75	1.811,44	478,33	502,24
4	Pidie	7.814,00	7.056,45	5.777,75	6.066,64
5	Pidie Jaya	1.160,19	1.470,20	1.391,46	1.461,03
6	Bireuen	3.259,72	2.643,19	6.327,54	6.643,92
7	Aceh Utara	3.005,35	2.210,07	2.174,45	2.283,18
8	Aceh Timur	1.067,90	1.257,27	1.280,71	1.344,74
TOTAL PRODUKSI		17.773,68	16.514,93	17.509,51	18.384,98

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Pada tahun 2022 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Bireuen sebesar 6.643,92 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pidie sebesar 6.666,64 ton, Aceh Utara sebesar 2.283,18 ton, Pidie Jaya 1.461,03, Aceh Timur sebesar 1.344,74 ton, Aceh Besar sebesar 502,24 ton, Aceh Barat Daya sebesar 58,70 ton dan Aceh Selatan sebesar 24,53 ton.

Meskipun produksi garam telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca,

teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2022, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Rendahnya harga garam menyebabkan banyak petambak enggan untuk berproduksi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan; 5) Masih berlanjutnya wabah covid 19 sehingga tingkat permintaan pasar masih rendah;

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2022 didukung oleh kegiatan :

- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

GAMBAR 3.8. MODERNISASI PRODUKSI GARAM DI TAHUN 2022



E. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Selama dua tahun yaitu tahun 2019-2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

IKU 7. Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.13. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2022

Sasaran Strategis-5		Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.051.244,00	1.794.561,00	2.359.588,00	131,49	1.794.561,00	131,49

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh); Ket : **= data sementara

Pada tahun 2022, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2.359.588,00 USD atau telah mencapai 131,49 % dari target tahun 2022 yaitu sebesar 1.794.561,00 USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 2.051.244,00 USD, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 15 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 1,7 juta USD, realisasi tahun 2022 telah mencapai 131,49 %.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2022 yaitu udang dan kepiting mencapai 1,19 juta USD (50,63%), (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,99 juta (42,30%), kerapu sebesar 0,14 juta USD (5,98%), dan lobster sebesar 26 ribu USD (1,12%).

Salah satu penyebab tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2022 dikarenakan meningkatnya produksi komoditas utama seperti udang vaname, yang menyebabkan peningkatan volume ekspor jenis udang segar dan juga terjadinya peningkatan volume tangkapan ikan jenis tuna, tongkol dan cakalang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti singapura, china dan jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan traceability;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Memperbaiki distribusi pasokan bahan baku;

- Peningkatan jejaring pasar domestik dan internasional melalui promosi dagang seperti partisipasi dalam pameran.

F. Sasaran Strategis 5 : Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran strategis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

IKU 8. Luas Kawasan Konservasi Perairan Ekspor Perikanan

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2022. IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan adalah jumlah penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur melalui beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Sampai dengan tahun 2022, realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2022 yaitu seluas 171.115,84 ha atau sebesar 60,87 % dari target 281.100 ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 3.14

TABEL 3.14. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

Sasaran Strategis-6		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Luas kawasan konservasi perairan (ha)	167.213,11	281.100,00	171.115,84	60,87	281.100,00	60,87

Sumber : DKP Aceh 2022; Ket : * data sementara

Jika dibandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2021 sebesar 5.440,76 hektar maka tahun 2022 mengalami perlambatan penambahan kawasan konservasi yang hanya mencapai sebesar 3.902,73 hektar, dengan tingkat pertumbuhan

pertahun 2018-2022 sebesar 9,19%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2022 mencapai 59,49%.

Luas kawasan 171.115,84 ha tersebut terdiri dari 27 kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.15. LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Aceh Besar	8	29.615,63
2	Aceh Jaya	2	50.041,43
3	Aceh Barat Daya	6	16.017,45
4	Aceh Selatan	5	3.590,34
5	Simeulue	4	69.053,78
6	Aceh Tamiang	2	2.797,21

Sumber : DKP Aceh, 2022

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terjadi perubahan anggaran pada tahun 2022 yang dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 sehingga banyak calon kawasan konservasi tidak dapat ditetapkan. Selain itu, terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2022.

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2022, yaitu identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan zonasi dan

rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU selama tahun 2022 di antaranya :

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi;
- d. Fasilitasi penetapan kawasan konservasi dengan adanya penambahan kawasan baru melalui Pencadangan oleh Gubernur;
- e. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan IKU mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau jenis ikan tertentu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

TABEL 3.16. PROPORSI TANGKAPAN IKAN TERHADAP MSY (%) TAHUN 2022

Sasaran Strategis-6		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	87,25	80,67	87,68	108,69	84,34	103,96

Sumber : DKP Aceh, 2022; Ket : *=Angka sementara

Pada tahun 2022 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 283.676 ton atau 87,25% dari Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya diwilayah perairan WPP 571 dan 572, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dikategorikan aman, namun dilihat dalam empat tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 76,40% pada tahun 2017 menjadi 87,25% pada tahun 2022, Capaian ini masih berada dalam batas biologis yang aman, namun tidak menurunkan kondisi ekonomi pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Hal ini menandakan bahwa potensi sumber daya ikan belum dioptimalkan karena penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional masih di sekitar perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka serta tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih di bawah nilai MSY.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bantuan penggantian alat tangkap, peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 18 Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua upaya yang merusak lingkungan laut, sehingga diharapkan dapat terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan Aceh (WPP 571 dan WPP 572). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 3.17. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%) 2022

Sasaran Strategis-6		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir				
Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
		Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,96	4,96	3,03	61,09	4,97	60,97

Sumber : DKP Aceh, 2022; Ket : *= Angka sementara

Pada tahun 2022 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,96% atau 167.213,11 ha, dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan belum melampaui terget tahun 2022 sebesar 4,96% atau 59,60%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 11.441,03 ha luas kawasan konservasi perairan mengalami perlambatan sebesar 52,44% atau terealisasi sebesar 5.440,76 ha.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove dikawasan konservasi bentuk wujud dari rehabilitasi kawasan konservasi.

Pembentukan kawasan konservasi ini juga didukung kemitraan dengan LSM yang memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi , antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi.

3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh

Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DKP Aceh kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada tahun 2022, APBA DKP Aceh semula sebesar Rp. 222.626.392.960,- dan terdapat penyesuaian menjadi Rp. 224.839.392.960,- dengan Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan sebesar 95,00%/kategori baik, dan terealisasi sebesar 95,97 %/kategori baik atau 101 % dari target. Apabila dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 yaitu sebesar 70,19 %, realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,86 %.

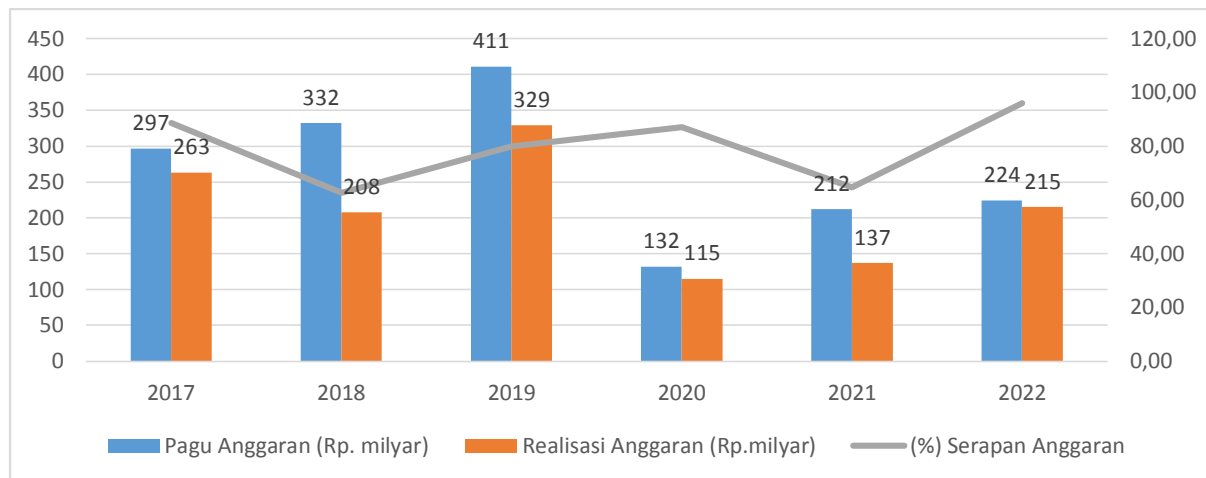
TABEL 3.18. CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN DKP ACEH TAHUN 2022

KINERJA ANGGARAN							
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	2022			% RATA-RATA KENAIKAN SERAPAN ANGGARAN 2018- 2021
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
62,67	79,91	87,40	64,58	95,00	95,97	101,02	20,48

Sumber : DKP Aceh, 2022; Ket : *=Angka sementara

APBA DKP tahun 2018 sampai 2022 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon III lingkup DKP Aceh, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Alokasi anggaran tahun 2022 digunakan untuk pembiayaan enam program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Perkembangan pagu dan realisasi DKP sebagaimana tabel berikut.

GAMBAR 3.9. GRAFIK PAGU, REALISASI DAN SERAPAN ANGGARAN APBA DKP ACEH TAHUN 2017-2022



Penyerapan anggaran DKP Aceh tahun 2022 cenderung positif, meski pun mengalami penurunan sebesar 22,82% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Mengingat ditahun 2022, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan menghadapi tantangan besar akibat adanya pandemi Covid-19 yang tentu saja berdampak hampir disemua sektor dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi.

TABEL 3.19. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DKP BERDASARKAN PROGRAM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2022				
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK (%)	KEUANGAN	
				(%)	(Rp)	(%)
1	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.150.245.161	40.150.245.161	97,14	39.001.764.821	97,14
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.814.290.970	3.814.290.970	99,36	3.790.038.770	99,36
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	88.664.545.659	88.664.545.659	96,27	85.353.449.463	96,27
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	84.669.222.645	85.419.222.645	96,96	82.821.851.453	96,96
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	350.000.000	350.000.000	98,86	345.998.804	98,86
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.978.088.525	6.441.088.525	69,34	4.466.388.796	69,34
JUMLAH TOTAL		222.626.392.960	224.839.392.960	95,97	215.779.492.107	95,97

Sumber : DKP Aceh, 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 98,86 % dan

realisasi terendah pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 69,34 %.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 diantaranya :

1. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, cuaca buruk;
2. Adanya pekerjaan yang tidak cukup masa waktu pengerjaan, karenanya tidak dapat diselesaikan oleh pihak ke tiga sampai batas waktu pengerjaan berakhir.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya:

1. Penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan **"Aceh Hebat"** yang tercantum dalam dokumen RPJMA;
2. Meminta kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
3. Seluruh kegiatan pada Eselon III lingkup DKP Aceh dapat dilakukan pemantauan oleh Tim Monev untuk pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masing;

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu mengantisipasi perubahan di tahun 2022 yang berpotensi mempengaruhi capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.

Sepanjang tahun 2022, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2023 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh pada Tahun 2022 adalah 93,65% atau mengalami kenaikan 3,4 % dibandingkan rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 (92,48%). Dari 6 total Sasaran

strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 4 sasaran strategis yang melebihi target atau lebih dari 100 % yaitu (1) Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, (2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan, (3) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, Meningkatkan neraca perdagangan perikanan dan (4) Meningkatkan neraca perdagangan perikanan. Sementara itu, terdapat 2 sasaran strategis yang nilai capaiannya dibawah 100 % yaitu (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh, dan (2) Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir.

Pada tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh semula mengelola anggaran APBA sebesar Rp. 222.626.392.960,- dan terdapat penyesuaian menjadi Rp. 224.839.392.960,- . Nilai Kinerja Anggaran yang ditargetkan sebesar 95,00% (kategori baik) dan realisasi yang diperoleh sebesar 95,97 % (kategori baik) atau 101 % dari target. Apabila dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 (70,19 %), maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,86 %.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah. Untuk itu, rencana aksi/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah :

- A. Untuk Bantuan Pemerintah DKP Aceh kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk menysasar masyarakat kelautan dan perikanan yang tepat agar menyumbangkan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dan mengentaskan angka kemiskinan di Aceh.
- B. Dalam rangka mendukung sasaran strategis, meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, perlu adanya dukungan optimalisasi perikanan budidaya melalui aplikasi teknologi yang tepat guna, insentif/ bantuan benih, pakan dan sarana prasarana budidaya ikan kepada pelaku usaha budidaya ikan air payau dan air tawar. Sedangkan pada penangkapan ikan perlu dioptimalkan penyaluran

bantuan/ insentif armada tangkap, alat tangkap, alat bantu tangkap, sarana prasarana pendukung lainnya serta dukungan optimalisasi sarapras pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan.

- C. Identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.
- D. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan mutu hasil perikanan, ikut partisipasi dalam pameran produk perikanan nasional maupun internasional dan akses permodalan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Aceh.
- E. Optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemenuhan sarana prasarana pengawasan dan peningkatan kemampuan SDM, guna memastikan keberlanjutan/ kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan DKP Aceh. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan bidang terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan/segenap jajaran di seluruh DKP Aceh serta dukungan dari stakeholder terkait.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALIMAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh**

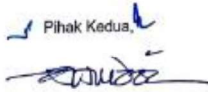
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T**
Jabatan : **Gubernur Aceh**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

Banda Aceh, 2022



ALIMAN, S.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,00 103,00
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,04
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,32
4.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	5. Produksi Perikanan (ton) 6. Produksi Perikanan Tangkap (ton) 7. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 8. Produksi Gasam (ton)	370.230,00 231.568,00 138.882,00 43.106,52
5.	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	9. Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.794.561,00
6.	Bertambahnya luas kawasan konservasi laut dan pantai	10. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	281.100,00

Program	Anggaran	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	40.949.790.161
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	2.970.937.400
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	80.279.254.908
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	80.736.545.531
5. Program Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	350.000.000
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	1.300.000.000



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

Banda Aceh, 2022



ALIMAN, S.Pi, M.Si

2. Pengukuran Kinerja 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,07	106,00	111,83	105,50	106,00	105,50
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	103,26	103,00	105,94	102,85	103,00	102,85
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	60,07	58,64	60,58 *	103,31	58,64	103,31
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,59	5,32	5,15 **	96,80	5,32	96,80
4	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi Perikanan (ton)	417.947,05	370.250,00	420.500,70 *	113,57	370.250,00	113,57
		- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	283.676,35	231.568,00	285.094,73 *	123,11	231.568,00	123,11
		- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	134.270,70	138.682,00	135.405,97 *	97,64	138.682,00	97,64
		Produksi Garam (ton)	17.509,51	43.166,52	18.384,98 *	42,59	43.166,52	42,59
5	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.051.244,00	1.794.561,00	2.359.588,00 **	131,49	1.794.561,00	131,49
6	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	167.213,11	281.100,00	171.115,84 **	60,87	281.100,00	60,87
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	87,25	80,67	87,68	108,69	84,34	103,96
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,96	4,96	3,03	60,99	4,97	60,87



PPID Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelola Data